
**Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan
(Studi Pada KPP Malang Selatan Periode 2013-2018)**

Oleh

Alif Adi Prasetyawan *)

Ronny Malavia Mardani)**

Budi Wahono*)**

Email : alifadipras@gmail.com

ABSTRACT

The author finish this research with 3 dependen variabels inflastion, tax audit, and number of taxpayers. As for from author why include inflastion is nothing but an indicator of many macro economic factors. Tax intensification policie simplemented by the government to analyze tax payer compliance with tax obligations. The inspection the leakage of state revenues from taxes. Today the government is implementing extensification policies such as expanding the tax base so that tax payer increase. It is also expected that the increasing number of tax payer will also encourage state revenues to increase, especially in the tax revenue sector. This research is explanatory type. Using secondary data, as well as obtained through documentation techniques, which researchers get data in the form of months per year. This study uses the object of research in the data entry of the South Malang Pratama Tax Office andthe Malang Central Statistics Agency website library period 2013-2018. To complete this research the researchers used a linear regression tes tand several other statistical test including hypothesis testing. Analysis of the data from the SPSS states that the results are : the number of tax payers shows a significant positive effect on income tax revenues in the South Malang Pratama Tax Office for the period 2013-2018. The result is contrary to the other two variables.

Keyword : Inflation, Tax audit, number of taxpayers, income tax receipt

Pendahuluan

Latar belakang

Pajak merupakan peran masyarakat selaku wajib pajak pada kas negara serta dibebankan kepada orang pribadi atau badan dan memiliki sifat wajib bagi masyarakat sesuai dengan yang dijelaskan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan membayar pajak masyarakat tidak akan merasakan timbal balik saat itu juga namun diaplikasikan oleh negara dengan diwujudkannya kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini tentunya berdampak besar pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. *Self assesment system* yang mana mengharuskan para wajib pajak untuk aktif dalam menyelesaikan administrasi perpajakan dari penghitungan hingga pelaporan pada KPP setempat dan juga

harus paham dan mampu untuk mengaplikasikan aturan-aturan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun diantaranya kebijakan yang berupa ekstensifikasi dan intensifikasi dibuat dan diatur pemerintah guna memaksimalkan pencapaian target penerimaan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2018) “Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari sektor perpajakan. Nota keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2018 mencatat penerimaan di sektor perpajakan menyumbang sebesar 89,6 % dari sumber penerimaan dalam negeri.

Meningkatnya sektor penerimaan pajak tahun 2018 dipengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik pada tahun 2017, dan upaya mengoptimalkan tindak lanjut kebijakan disektor perpajakan dan meneruskan reformasi pajak (*TaxReform*) untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang berkelanjutan diantaranya peraturan yang terus diperbaiki dan disempurnakan, meningkatkan SDM, serta meningkatkan penggunaan teknologi terbaru (*uptodate*) dan berintegrasi secara menyeluruh. Revisi serta perbaikan / peningkatan undang-undang pajak juga dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Nasution (2013) “Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar”. Kegiatan pemeriksaan merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak, diaplikasikan dengan pemeriksaan SPT yang sesuai ketentuan.

Menurut Soemitro dalam Rahayu (2010) “ Ekstensifikasi perpajakan yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak”. Diharapkan juga dengan jumlah wajib pajak yang terus meningkat mendorong pendapatan negara juga meningkat.

Penerimaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah, akan tetapi terdapat beberapa faktor lain (eksternal). Menurut Sukirno (2010) “Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang secara umum sehingga inflasi akan mempengaruhi impor suatu negara berkembang lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah”.

Rumusan masalah

Dengan uraian latar pendahuluan diatas, dan guna mengetahui pengaruh variabel yang sudah ditentukan, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah :

1. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan?

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Bagi KPP
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak tentang pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Bagi Akademisi
Diharapkan menjadi wacana, memberi masukan dan tambahan literatur untuk para akademisi menggali pengetahuannya dalam bidang perpajakan.
3. Bagi Masyarakat
Untuk memberi gambaran tentang pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, sehingga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

b. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis
Diharapkan dengan penelitian yang sudah diselesaikan ini, membawa manfaat serta menambah pengetahuan, dan juga memperoleh pengalaman lapangan tentang pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Bagi Instansi
Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Bagi Pihak Lain
Dengan penelitian ini bisa jadi sebagai acuan atau bahan dasar untuk pengembangan yang lebih lanjut mengenai tema yang sama, yaitu pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang Selatan.

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang bersinggungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis, baik dari tema maupun materi yang diangkat.

Berdasarkan Nasution, herawati dan rifa (2013) melakukan penelitian tentang “pengaruh tingkat inflasi, pemeriksaan pajak, dan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (studi kasus kota Padang periode 2010-2012)”. Menyatakan bahwa pengaruh tiga variabel dependen pada penelitian ini sebesar 4,4% sedangkan 95,6% sisanya ialah faktor-faktor yang berpengaruh pada penelitian tersebut, namun faktor itu tidak tercantum di penelitian tersebut. Bahwa secara simultan dan parsial semua variabel dependen tidak berpengaruh signifikan.

Berdasarkan penelitian oleh Agustin (2015) tentang “pengaruh pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak pada penerimaan pajak penghasilan pada KPP Malajaya”. Berkesimpulan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif namun signifikan, begitu juga jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif namun signifikan.

Penelitian oleh Nicoladkk (2016) tentang “pengaruh inflasi, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara periode 2010-2014)”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif namun signifikan, serta jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif namun signifikan.

Amanah dkk (2017) melakukan penelitian tentang “pengaruh jumlah wajib pajak dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Studi empiris pada KPP Pratama Bukit tinggi Periode 2014-2016)”. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif namun signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, jumlah surat pemberitahuan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Rahman (2018) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Makasar Utara 2009-2014”. Menjelaskan kalau pemeriksaan pajak atas SPT PPh badan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Makasar Utara.

Tinjauan Teori

Pajak penghasilan

Menurut Resmi (2013:74) “pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2008, “Menjelaskan bahwa subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dijelaskan bahwa subjek pajak menjadi wajib pajak, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber di Indonesia”.

Dari pasal diatas bisa ditafsirkan bahwa wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, yang telah sesuai dengan kewajiban subjektif dan objektif, dan dibebankan pada wajib pajak untuk membayar pajak pada negara.

Inflasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Inflasi adalah kemerosotan nilai mata uang (kertas) karena terlalu banyak beredar dan menyebabkan melambungnya harga barang-barang”.

Di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi masih kerap terjadi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi di negara berkembang belum kokoh sepenuhnya. Sehingga rawan akan gangguan dari intern ataupun ekstern. Banyak faktor yang

mempengaruhi suatu negara yang dilanda inflasi, diantaranya : perbedaan kurs mata uang yang tinggi, meningkatnya hutang negara, dan harga komoditas di pasar domestik yang fluktuatif, dsb.

Pemeriksaan pajak

Sedangkan menurut Undang-undang KUP Pasal 1 huruf 25 (2013) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

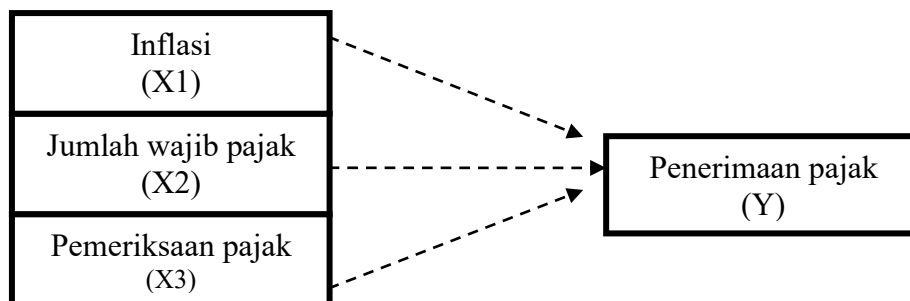
Dengan adanya pemeriksaan pajak ini diharapkan bisa meningkatkan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak. Maka bisa dipastikan jika wajib pajak (fiskus) memiliki kewajiban agar melaksanakan kegiatan pemeriksaan pajak dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan kegiatan pemeriksaan ini akan terus bertambah baik untuk setiap tahunnya.

Jumlah wajib pajak

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun (2009) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) atas diri individu sesuai ketentuan undang-undang yang berprofesi apapun serta memiliki penghasilan sesuai ketentuan undang-undang, Wajib pajak badan yang diartikan perkumpulan orang bisa juga badan, juga melakukan kegiatan usaha dan bisa juga tidak.

Kerangka konseptual

Berdasarkan uraian diatas, inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat. Kerangka konseptual pada penelitian ini adalah :



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Jenis, lokasi, & waktu penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Eksplanatori. Lokasi penelitian ini dilakukan pada *entry data* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan data kepustakaan (*website*) Badan Pusat Statistik Malang. Yang telah mempublikasi data dokumentasi tahun 2013-2018. Penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019.

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi.

Adapun Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”. Objek penelitian yang penulis teliti adalah tentang pengaruh inflasi (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), dan jumlah wajib pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Sumber & metode pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain kemudian data tersebut dipublikasikan oleh khalayak untuk kepentingan tertentu. Data tersebut diperoleh dari data dokumentasi dari KPP Malang Utara dan data kepustakaan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Malang.

Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Data tersebut secara tidak langsung diperoleh dari data dokumentasi dari KPP Malang Utara.

Definisi Operasional Variabel

1. Variabel dependen

Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan.

2. Variabel independen

Variabel independen menurut Sugiyono (2012:39), adalah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Inflasi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Inflasi adalah kemerosotan nilai mata uang (kertas) karena terlalu banyak beredar dan menyebabkan melambungnya harga barang-barang”.
- b. Pemeriksaan pajak
Undang-undang KUP Pasal 1 huruf 25 (2013) “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
- c. Jumlah wajib pajak
Undang-Undang nomor 16 Tahun (2009) “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Metode Analisis Data

Uji normalitas

Uji *Kolmogorov Smirnov* dipakai di penelitian ini dimana di uji itu dinyatakan tingkat signifikan 0,05. Adapun aturan dalam pengujian menggunakan uji normalitas kali ini ialah : apabila hasil dari nilai sig. < 0,05 dinyatakan bahwasanya data terdistribusi secara normal, akan tetapi apabila hasil dari nilai sig. > 0,05 dinyatakan bahwasanya data terdistribusi dengan secara tidak normal.

Uji asumsi klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipakai guna mengetahui kalau dalam regresi tampak perbedaan model varians dari residual antara satu dan yang lainnya. Uji Glejser dipakai untuk menguji heteroskedastisitas penelitian ini, yaitu dengan ketentuan apabila nilai sig. antara variabel independen lebih dari 0,05 atau (sig. > 0,05) maka tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Groebneretal. (2014), “*if the VIF < 5 for a partikular independent variable, multicolinearity is not considered a problem for that variable. VIF values > 5 imply that the correlation between the independent variable is too extreme and should be dealt with by dropping variables from the model*” yang artinya jika $VIF < 5$ untuk sebuah variabel tertentu, multikolinieritas tidak dianggap sebagai masalah untuk variabel itu, nilai $VIF > 5$ menyiratkan bahwa korelasi antara variabel independen terlalu

ekstrem dan harus ditangani dengan memisahkan variabel dari model / persamaan.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bisa mengetahui pengujian mengenai kesalahan maupun gangguan yang terjadi di waktu sebelumnya (t-1), kesalahan maupun gangguan tersebut bisa dilihat dari indikasi melalui model regresi linier. Pengujian ini menggunakan Durbin-Watson.

Analisis regresi linier berganda

Menurut Ghazali (2011:223), “tujuan analisis regresi moderasi ini untuk mengetahui apakah variabel *moderating* akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *ModeratedRegressionAnalysis* (MRA)”.

$$Y = \alpha + \beta_1 INF + \beta_2 WP + \beta_3 PEM.PAJAK + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan

α =Konstanta

β =Koefisien Regresi

INF = Inflasi

WP = Wajib Pajak

PEM. PAJAK = Pemeriksaan Pajak

Pengujian hipotesis

a. Uji F

Menurut Ghazali (2005), “Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat”. Apabila nilai probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji t

Ghozali (2011:98) “Bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen atau uji t awalnya memperlihatkan berapa jauh berpengaruh satu variabel independen”. Uji ini melihat pengaruh antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan signifikansi t hitung adalah :

a. Jika nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima

b. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak

Ketentuan Uji ini dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi :

a. Jika nilai probabilitas signifikansi (ρ) $>$ tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak.

- b. Jika nilai probabilitas signifikansi (ρ) < tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PENGAJ	INF	JWP	PP
N		72	72	72	72
Normal Parameters(a,b)	Mean	22.0739	-1.1553	11.5856	3.7146
	Std. Deviation	1.02498	1.02553	.09698	1.26102
Most Extreme Differences	Absolute	.134	.097	.094	.133
	Positive	.134	.087	.074	.096
	Negative	-.081	-.097	-.094	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		1.136	.819	.798	1.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.151	.513	.547	.156

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil tabel 1 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig.* diperoleh nilai pada penghasilan pajak $0,151 > 0,05$, maka dari itu data dalam penelitian ini dinyatakan normal.

Uji asumsi klasik

a. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.662	7.761		-.214	.831		
	INF	-.041	.062	-.081	-.666	.508	.905	1.105
	JWP	.159	.676	.030	.236	.814	.843	1.186
	PP	.103	.050	.251	2.080	.041	.928	1.077

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari hasil tabel 2 diatas bisa disimpulkan :

1. Pada variabel independen inflasi diketahui bahwa nilai sig. $0,508 > 0,05$. Sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Pada variabel independen jumlah wajib pajak diketahui bahwa nilai sig. $0,814 > 0,05$. Sehingga tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

3. Pada variabel independen pemeriksaan pajak diketahui bahwa nilai sig. 0,041 < 0,05. Sehingga terdapat masalah heteroskedastisitas.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients(a)

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	INF	.905	1.105
	JWP	.843	1.186
	PP	.928	1.077

a. Dependent Variable: PENGPAJ

Dari hasil tabel 3 diatas bisa disimpulkan :

1. Pada variabel independen inflasi diketahui bahwa nilai *tolerance* 0,905 dan nilai VIF 1,105 < 4. Sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas.
2. Pada variabel independen jumlah wajib pajak diketahui bahwa nilai *tolerance* 0,843 dan nilai VIF 1,186 < 4. Sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas.
3. Pada variabel independen pemeriksaan pajak diketahui bahwa nilai *tolerance* 0,928 dan nilai VIF 1,1077 < 4. Sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617(a)	.381	.354	.82390	1.060

a. Predictors: (Constant), PP, INF, JWP

Dari hasil uji Autokorelasidiatas menyatakan kalau posisi nilai d adalah pada kriteria $0 < 1,060 < 1,5323$. Dan menurut tabel kriteria pengambilan keputusan Durbin-Watson, maka dinyatakan ada autokorelasi.

Analisis regresi linier sederhana

Tabel 5

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-50.742	12.611		-4.024	.000		
	INF	-.049	.100	-.049	-.486	.629	.905	1.105
	JWP	6.274	1.098	.594	5.713	.000	.843	1.186
	PP	.021	.080	.026	.259	.796	.928	1.077

Maka dapat disusun model persamaan sebagai berikut :

$$P = -50,742 - 0,049 (INF) + 6,274 (WP) + 0,021 (PEM.PAJAK)$$

- Nilai konstanta -50,742 maka bisa disimpulkan jika nilai semua variabel independen 0 maka penerimaan pajak penghasilan adalah -50,742.
- Nilai koefisien variabel inflasi di persamaan regresi linier berganda ialah -0,049, apabila inflasi mengalami kenaikan satuan maka penerimaan pajak penghasilan juga meningkat -0,049.
- Nilai koefisien variabel jumlah wajib pajak di persamaan regresi linier berganda ialah 6,274, apabila jumlah wajib pajak mengalami kenaikan satuan maka penerimaan pajak penghasilan juga meningkat 6,274.

Pengujian hipotesis

a. Uji F

Tabel 6
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.433	3	9.478	13.962	.000(a)
	Residual	46.159	68	.679		
	Total	74.592	71			

a Predictors: (Constant), PP, INF, JWP

b Dependent Variable: PENGPAJ

Dari hasil uji F dari tabel 6 diatas bisa disimpulkan jika nilai sig. 0,000 yang mana nilai sig. <alpha (0,05). Sehingga menurut ketentuan bisa diartikan jika ada beberapa variabel independen yang bisa menjabarkan pengaruh variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini.

b. Uji t

Tabel 7

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-50.742	12.611		-4.024	.000		
	INF	-.049	.100	-.049	-.486	.629	.905	1.105
	JWP	6.274	1.098	.594	5.713	.000	.843	1.186
	PP	.021	.080	.026	.259	.796	.928	1.077

Dari hasil uji t tabel 7 diatas bisa disimpulkan :

- Nilai t statistik inflasi sebesar 0,629. Oleh karena t statistik $< 0,05$ maka bisa disimpulkan secara parsial inflasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).
- Nilai t statistik jumlah wajib pajak sebesar 0,000. Oleh karena t statistik $< 0,05$ maka bisa disimpulkan secara parsial jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).
- Nilai t statistik pemeriksaan pajak ialah 0,796. Oleh karena t statistik $< 0,05$ maka bisa disimpulkan secara parsial pemeriksaan pajak memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y).

Simpulan Dan Saran

Simpulan

- Variabel inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak secara bersama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Malang Selatan.
- Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam hal ini bertempat di KPP Malang Selatan.
- Variabel jumlah wajib pajak memiliki pengaruh positif akan tetapi berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam hal ini bertempat di KPP Malang Selatan.
- Variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan dalam hal ini bertempat di KPP Malang Selatan.

Keterbatasan

Dari hasil penelitian ini ada keterbatasan sehingga untuk kedepannya buat penelitian selanjutnya ada perbaikan yang harus dilakukan serta pengembangan meteri yang lebih lanjut.

- Penelitian dilakukan hanya di KPP Malang Selatan dalam kurun waktu 2013-2018. Seyogyanya dilakukan juga pada KPP Malang Utara sehingga bisa mewakili penelitian pada KPP di Kota Malang.

- b. Variabel dalam penelitian ini diantaranya inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak. Dan banyak variabel lainnya yang memiliki pengaruh lebih dibandingkan dengan variabel dalam penelitian ini.

Saran

Dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian, berikut penulis menyampaikan saran yaitu :

- a. Bagi pemerintah harusnya lebih intens dan responsif saat terjadinya inflasi karena pengaruh ekonomi secara makro sangat besar. Begitu pula dengan IHK (indeks harga konsumen) yang harus selalu tetap stabil serta dalam pengawasan pemerintah, dengan begitu tingkat inflasi masih bisa dalam kendali walaupun masuk dalam kategori inflasi rendah dapat dihadapi melalui berbagai cara salah satunya, mengontrol kenaikan harga barang / jasa yang terus naik setiap waktu. Penyeimbang antara *demand* dan *supply*, serta menindak lanjuti arus barang / jasa dari berbagai sumber guna mencegah penimbunan barang yang akan mengacaukan persediaan dan cenderung dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
- b. Bagi Kantor Pajak Pratama, hasil pengujian dan pembahasan penelitian bisa digunakan untuk bahan pemikiran atau referensi dalam perumusan pengambilan kebijakan khususnya di sektor perpajakan, diharapkan juga bisa untuk mendukung peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi perpajakan, khususnya secara intensif dalam pemeriksaan dan penerbitan SKP.
- c. Bagi pemerintah, sebisa mungkin untuk melakukan kajian dalam pertimbangan kebijakan khususnya strategi guna peningkatan wajib pajak yang terdaftar, dikarenakan wajib pajak memang salah satu indikator terpenting dalam hal dan upaya peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan ini nantinya bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan seperti sosialisasi yang intensif di semua daerah kepada masyarakat terkait kewajiban untuk membayar pajak, memperluas jangkauan wajib pajak terdaftar (*canvassing*), dan lain sebagainya.
- d. Bagi peneliti selanjutnya bisa jadi sumber atau bahan pemikiran terkait variabel yang akan diteliti dikemudian hari, peneliti bisa memakai variabel lainnya yang selain variabel di penelitian ini. Jangka waktu penelitian ini 6 tahun (bisa dikatakan cukup bisa juga kurang) akan tetapi lebih baik jika ditambah menjadi 10 tahun. Dikarenakan lebih dari 50% faktor yang berpengaruh adalah selain dari penelitian ini, maka peneliti selanjutnya diharapkan lebih peka dan cenderung melihat dan mempertimbangkan faktor lain seperti faktor yang mempengaruhi kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, suku bunga, tingkat nilai kurs rupiah, ketepatan waktu pelaporan oleh wajib pajak, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, 2015. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi kasus pada KPP Pratama Malajaya*. Malajaya. Universitas Komputer Indonesia.
- Amanah dkk, 2017. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Bukit Tinggi. Universitas Bung Hatta.
- Anton, H. Gunawan, 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2018, *Laporan Tahunan DJP 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Groeber, David F., Patrick W. Shannon and Phillip C. Fry, 2014, *Business Statistics, A Decision-Making Approach*, Pearson Education, British
- Ghazali, Imam, 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hays, W.L & Winkler, R.L, 1971, *"Statistic Probability, Inference, and Decision"*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Kementerian keuangan, 2018, *Nota Keuangan dan APBN 2018*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian keuangan, 2013, *Undang-undang KUP dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Kementerian keuangan.
- Mankiw, N. Gregory, 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasution, Rahmat Husein dkk, 2013. *Pengaruh inflasi, Pemeriksaan pajak, dan Wajib pajak orang pribadi terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi studi pada Kota Padang*. Padang. Universitas Bung Hatta.
- Nicoladkk, 2016. *Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Malang. Universitas Brawijaya.
- Rahman dkk, 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar. STIE Tri Dharma Nusantara Makassar.
- Rahayu, Siti kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadono, Sukirno, 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, Singgih, 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media komputindo.

- Suandy, Erly, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba empat..
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukirno, Sadono, 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surjoputro, Djoko Slamet dan Junaedi Eko Widodo, 2004. “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui modernisasi Administrasi Perpajakan,*” dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., *Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia : Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang*, Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Susyanti, Jeni dan Ahmad Dahlan, 2016, *Perpajakan untuk praktisi dan akademisi*, Malang: Empat dua Media
- Tresnodkk, 2011. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa Badan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

*) Alif Adi Prasetyawan Adalah Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

**) Ronny Malavia Mardani Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA

***) Budi Wahono Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA